

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA  
PASCA DIAKUI NYA JERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL  
OLEH AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu  
(S1) dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam**

Oleh:  
**Muhammad Faqih Hamdani**  
**NIM: E04213068**



**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
SURABAYA  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Muhammad Faqih Hamdani

NIM : E04213068

Program Studi : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Muhammad Faqih H.

NIM: E04213068

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : Muhammad Faqih Hamdani

NIM : E04213068

Judul : **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PASCA DIAKUI NYA  
JERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH AMERIKA  
SERIKAT.**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Juli 2019

Pembimbing ,



M. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP. 198401052011011008

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Muhammad Faqih Hamdani ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi,

Surabaya, 22 Juli 2019

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag  
NIP. 196409181992031002

Penguji I,

M. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP. 198401052011011008

Penguji II,

Laili Bariroh, M.Si  
NIP. 197711032009122002

Penguji III,

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si  
NIP. 197202062007101003

Penguji IV,

M. Anas Fakhruddin, M.Si  
NIP. 198202102009011007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faqih Hamdani  
NIM : E04213068  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Pemikiran Politik Islam  
E-mail address : faqihamdani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Diakuinya Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Oleh

Amerika Serikat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

  
(M.Faqih Hamdani)







































## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan konsep dari William D Coplin mengenai Teori Pembuatan Kebijakan sebagai dasar analisis untuk penelitian ini. Hal ini sangat penting untuk memberikan pandangan dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina. Sejalan dengan itu dalam konsep ini akan dijelaskan faktor-faktor yang menjadi pengaruh pengambilan kebijakan tersebut.

Selanjutnya dijelaskan Teori Pembuatan Kebijakan William D. Coplin yang menjelaskan faktor determinan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Ada 4 determinan mempengaruhi kebijakan luar negeri meliputi : konteks Internasional, konteks dalam negeri, pembuat kebijakan serta yang terakhir yaitu kondisi ekonomi dan militer mempengaruhi pengambilan sebuah kebijakan luar negeri.

Menurut peneliti konsep kebijakan luar negeri prespektif William D. Coplin merupakan salah satu konsep yang membantu dalam upaya peneitian ini. Peneliti berupaya menjelaskan proses hingga menjadi putusan sebuah kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut diambil. Untuk itu peneliti mengambil konsep William D. Coplin yang dirasa dapat menjelaskannya.

#### **Teori *Decision Making* / Pembuatan Keputusan**

Coplin mempunyai dua pandangan dalam melihat perilaku pengambil kebijakan sebuah negara, yaitu dengan *power politics* dan *issue politics*. Pandangan *power politics* terbagi lagi menjadi tiga, yaitu melihat dari *power* atau

















- b. *Partisan influencer*, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam system demokrasi.
- c. *Interest influencer*, yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. *Interest influencer* memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga *bureaucratic* dan *partisan influencer*. Mereka juga bisa menjanjikan dukungan finansial atau mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, *interest influencer* pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.
- d. *Mass influencer*, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM RELASI INDONESIA DENGAN PALESTINA, ISRAEL DAN AMERIKA SERIKAT**

Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum hubungan antara Indonesia-Timur Tengah khususnya terhadap Palestina. Hal ini sangat penting untuk mengetahui sejarah hubungan antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah khususnya Palestina. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam tentu memiliki sejarah yang panjang, bahwa sejarah hubungan Indonesia dan negara-negara arab ini terlihat dalam kegiatan yang penulis rangkum dalam beberapa hal seperti, pengakuan negara mesir terhadap kedaulatan Indonesia berikut aktifitas keagamaan (Haji) yang dilakukan Indonesia-Arab Saudi. Begitu juga dengan bidang ekonomi bahwa hubungan anantara Indonesia dan Timur Tengah sudah berjalan berabad lalu.

Berikutnya dalam bab ini penulis juga ingin memaparkan tentang hubungan dan Peran Penyelesaian Konflik Palestina-Israel yang didukung penuh Amerika Serikat. Dalam ini posisi Indonesia berada pada dua posisi yakni, bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan bahwa posisi Indonesia tidak memihak pada satu blok dan memilih caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah Internasional. Sedangkan aktif diartikan bahwa Indonesia secara aktif mendukung dan berusaha dalam memelihara perdamaian dunia dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada dunia Internasional

. Dijelaskan pula pada bab ini bagaimana kebijakan luar negeri yang diambil oleh presiden pertama hingga saat ini. Hal ini menggambarkan dukungan yang diberikan oleh Indonesia sejak presiden pertama hingga saat ini.

#### **A. Hubungan Indonesia dan Timur Tengah**

Sejak kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain selalu berpegang teguh pada haluan politik luar negerinya yang bebas aktif berdasarkan UUD 1945. Dalam prakteknya, Indonesia erat menjalin hubungan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah salah satunya dengan negara Palestina. Hubungan diantara kedua negara ini masih berjalan sangat baik hingga detik ini, “negara saudara” itulah yang sering kita dengar untuk menggambarkan betapa eratnya hubungan kedua negara ini terjalin.

Hubungan diantara kedua negara ini diawali ketika Palestina mendukung kedaulatan Indonesia. Saat diproklamasikannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh Soekarno & Hatta pada 17 Agustus 1945, tidak ada satupun Negara di dunia yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Ketika itu Indonesia telah berusaha untuk melakukan lobi agar kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Indonesia dapat diakui masyarakat di dunia, yakni dengan cara mengirimkan delegasi ke beberapa bagian negara seperti Eropa Timur dan Timur Tengah.

Syekh Muhammad Amin Al-Husaini<sup>37</sup> seorang mufti besar yang mewakili Palestina secara terbuka mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 September 1944 melalui radio Berlin menyiarkan ucapan selamat kepada Indonesia. Bahkan radio tersebut 2 hari berturut-turut menyiarkan berita itu.

Akhirnya usaha yang dilakukan Indonesia melalui pengiriman delegasi membuahkan hasil. Jamaa'ah Ikhwanul Muslimin di Mesir yang saat itu dipimpin oleh Imam Hasan Al Banna dan Mufti Palestina bernama Syaikh Muhammad Amin Alhusaini membantu Indonesia untuk melakukan lobi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Sehingga pada 22 Maret 1946 Kerajaan Mesir secara *defacto* mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, hal ini merupakan pengakuan pertama dari negara sahabat terhadap kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 18 Nopember 1946 Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab kemudian memutuskan agar negara-negara anggotanya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dan diikuti oleh negara-negara lain yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia diantaranya Lebanon (29 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947), Afghanistan (23 September 1947), Myanmar (23 Novemebr 1947), Arab Saudi (24 November 1947), Yaman (4 Mei 1948), dan Uni Soviet (26 Mei 1948).

Selain itu Indonesia juga merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestia di Aljazair pada 15 November 1988. Telah ditanda tangannya “Komunike

---

<sup>37</sup> Muhammad Amn al-Husyaini, seorang anggota klan al-Husayni Yerusalem, adalah nasionalis Arab-Palestina dan pemimpin Islam di daerah Mandat Britania atas Palestina. Dari 1921 hingga 1948, dia adalah Mufti Besar Yerusalem, dan memankan peran pnting dalam menentang Zionisme dan Negara untuk tempat tinggal orang Yahudi di Palestina





















total 53 negara anggota yang hadir menyetujui resolusi yang menghasilkan beberapa poin penting diantaranya:

- a) Membentuk Komisi Penyelidik HAM dengan tujuan mengumpulkan informasi terkait pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah yang telah dikuasai Israel, serta melaporkan kesimpulan dan temuan-temuan yang didapat di lapangan kepada Komisi HAM PBB.
- b) Meminta Komisaris Tinggi PBB untuk HAM segera melakukan kunjungan ke wilayah Palestina yang telah diduduki Israel dengan tujuan guna menghimpun pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina oleh Israel.

Dalam forum PBB, Indonesia kembali berhasil terpilih untuk ketiga kalinya pada pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2006 di Indonesia. Guna membayar kepercayaan dunia internasional atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB, maka Indonesia membutuhkan program kerja yang baik. Khususnya kontribusi Indonesia dalam permasalahan regional di Timur Tengah, program kerja yang dirancang oleh Indonesia mencakup beberapa poin penting terkait permasalahan Palestina yang berisi:

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendirikan sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sehingga dapat terwujud cita-cita untuk hidup damai secara berdampingan dengan



























Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Indonesia sangat aktif dalam forum multilateral untuk menyuatkan perdamaian di Palestina.

Pada masa SBY dukungan berupa *capacity building* juga menjadi program pemerintahan SBY. Pada tahun 2008 Presiden SBY bekerjasama dengan kementerian untuk membuat program bantuan untuk peningkatan kualitas rakyat Palestina. Hal ini ditanggapi positif oleh pemerintah Palestina sebagai bantuan kongkrit yang diberikan pemerintah Indonesia.

Selain itu dukungan Indonesia juga berupa pengiriman relawan MER-C, KISPA (Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina) serta Palang Merah Indonesia. Bantuan sangat diperlukan karena kondisi Palestina pada saat itu memang sangat butuh bantuan khususnya dalam bidang medis. MER-C<sup>80</sup> (*Medical Emergency Rescue Commite*) banyak membantu dalam proses evakuasi korban-korban konflik maupun korban bencana. Fokus pada saat itu berada di jalur Gaza yang pada waktu itu wilayah terbanyak yang terdampak konflik. Ribuan penduduk Gaza terbunuh dalam konflik yang pada waktu itu terjadi.

Selanjutnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia berupa bantuan kemanusiaan dan sosial. Indonesia bekerja sama dengan Jepang dengan membentuk forum *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD). Tujuan dari pembentukan forum tersebut untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Palestina. Selain itu Indonesia

---

<sup>80</sup> MER-C merupakan lembaga sosial-kemanusiaan yang berperan aktif dalam menangani secara medis korban akibat konflik dan bencana alam yang didirikan oleh mahasiswa UI (Universitas Indonesia) pada tahun 1999. Kegiatan pertolongan medis berawal dari konflik yang melanda Maluku hingga ke wilayah-wilayah konflik di dunia.













































pengendalian perdagangan maritim yang menghubungkan banyak negara melalui jalur transportasi air.<sup>122</sup>

Pada 2013, total perdagangan Singapura - Israel mencapai S\$1.956 milyar, melonjak 24.6% dari tahun ke tahun sejak 2012, menurut angka dari Kedutaan Besar Israel di Singapura dan IE Singapura. Singapura adalah negara pengimpor dari Israel, dan Israel mengekspor sebagian besar peralatan listrik ke Singapura, sementara itu Singapura mengekspor sebagian besar mesin dan peralatan komputer ke Israel.<sup>123</sup>

Selain itu, Singapura sebagai negara transit dan negara jasa juga memberikan peranan yang sangat signifikan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada berusaha menjadikan Singapura sebagai negara dengan konsep dan *framing* yang modern. Singapura menawarkan berbagai fasilitas jasa seperti airport terbaik kelas dunia, rumah sakit berkelas internasional, sirkuit bergengsi Formulai 1, gedung orkestra dan pertunjukan musik yang megah.

Selanjutnya hubungan Israel dengan salah satu negara ASEAN yaitu Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama telah berkembang di bidang infrastruktur dan pertanian antara Israel dan Vietnam, dengan jumlah perdagangan antardua negara lebih dari \$ 700 juta. Hubungan itu semakin menguat saat pemerintah Israel menerima Duta Besar Vietnam pertama pada tahun 2009. Kedua pemerintah juga

---

<sup>122</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2049305/port-of-singapore-pelabuhan-yang-jadi-pusat-dagang-123-negara>

<sup>123</sup> <http://itrade.gov.il/singapore/2014/01/17/singapore-israel-trade-hits-almost-s2-billion-2013/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2019













Kondisi yang miskin membuatnya terpacu untuk tetap bersemangat belajar dan cepat lulus. Seorang politikus biasanya berangkat dari menjadi aktivis, tapi Jokowi berbeda, semasa kuliah Jokowi lebih senang ikut kegiatan-kegiatan minat dan bakat seperti naik gunung, main basket dan sebagainya ketimbang sebagai aktivis.

Setelah lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi bekerja di sebuah BUMN di Aceh selama 1,5 tahun. Tidak lama kemudian, tahun 1986, Jokowi pun menikah dengan Iriana, seorang gadis yang dipacarinya sejak masih kuliah dulu.

Berhenti dari BUMN, Jokowi selanjutnya memutuskan pulang kampung ke Solo dan bekerja di CV. Roda Jati, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan. Sekitar tahun 1998, Jokowi kemudian merintis bisnis mebel sendiri. Bisnis mebel ini dimulainya dengan modal hutang. Jokowi menjaminkan sertifikat tanah milik orang tuanya untuk mendapatkan pinjaman dari Bank. Awal perjuangan Jokowi dalam berbisnis mebel dimulai dari menyewa tempat yang sangat sederhana, sebuah tempat kecil yang terbuat dari gedheg, yaitu dinding yang terbuat anyaman bambu. Waktu itu, pekerjaan dari mengolah kayu hingga membuat konstruksi dan mengecat mebel, dia lakukan sendiri dengan dibantu tiga orang tenaga.

Tiga tahun setelahnya, bisnis mebel Jokowi mulai menampakkan hasilnya. Ia mulai bisa mengekspor produksi mebelnya keluar negeri. Perjuangan Jokowi menjadi eksportir dimulai dari menjadi anak angkat



Latar belakang pemimpin sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil olehnya. Joko Widodo yang background pengusaha dalam kebijakannya menanggapi isu Yerusalem mengarah ke bidang ekonomi. Pembebasan bea cukai produk Palestina merupakan langkah strategis yang diambil Jokowi untuk member dukungan kepada Palestina.

Insting pengusaha yang dimiliki Presiden Joko Widodo membuat kebijakannya lebih mengarah kepada keuntungan untuk kedua pihak. Hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh Presiden dengan latar belakang lainnya. Walaupun bisa namun kemungkinan itu kecil. Jokowi mempunyai keunggulan dalam bidang ekonomi dibanding presiden-presiden yang lain. Oleh karena itu mengapa pemerintah lebih mengambil jalan kebijakan ekonominya dalam menanggapi isu di Yerusalem.

#### **D. Determinan Kodisi Militer dan Ekonomi**

Kekuatan militer dapat diukur melalui kapasitas militer yang meliputi jumlah personel, tingkat latihan, serta sarana dan prasarana militer yang dimiliki suatu negara. Sedangkan kekuatan ekonomi dapat diukur melalui Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Bruto (GNP) dan dapat pula diukur melalui neraca perdagangan (ekspor – impor) suatu negara. Neraca perdagangan dapat menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara dengan pihak eksternal negaranya. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu negara







kerjasama ekonomi ekspor-impor dengan Israel. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia menanggapi konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dengan membebaskan bea pajak produk Palestina sebetulnya memilih jalan tengah. Disatu sisi member bantuan dan dukungan kepada Palestina, disisi lain sebagai langkah aman untuk hubungan ekonomi dengan Israel.

Latar belakang Presiden Jokowi juga mendorong kebijakan luar negerinya menjadi suatu keuntungan buat Indonesia. Jokowi membuat suatu ancaman akibat kebijakan luar negeri menjadi suatu keuntungan. Insting pengusaha masih dipergunakan dalam hal pengambilan kebijakan luar negeri. Ketika isu yang sangat sensitif salah dalam pengambilan keputusan akan merugikan negara.

Dari sektor ekonomi Indonesia masih mengandalkan investor dari Israel karena produk Israel banyak di Indonesia. Indonesia sangat diuntungkan oleh investor-investor dari Israel sebagai sumber pendapatan negara. Sulit untuk Indonesia lepas dari dominasi tersebut karena produk tersebut sudah diterima dan menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Hal tersebut semakin menyulitkan Indonesia dalam pengambilan sikap tegas kepada Israel dalam pengambilan kebijakan luar negerinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berbagai usaha telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu yang terjadi di Palestina. Pasca diakuinya Yerusalem oleh Amerika Serikat sebagai ibukota Israel Indonesia menyatakan merespon tegas akan hal tersebut. Dari uraian kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Yerusalem, dapat disimpulkan bahwa :

*Pertama*, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Yerusalem tidak terlepas dari berbagai faktor mempengaruhinya, meliputi Indonesia sebagai penggagas KAA masih mempunyai hutang kepada Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya sesuai amanah dari konstitusi, kedekatan secara *religio cultural* membuat Indonesia terdorong untuk memberikan dukungan kepada Palestina, Keputusan Amerika Serikat tidak memberikan solusi damai antar kedua negara Israel dan Palestina bahkan semakin memperumit keadaan, Tindakan Amerika Serikat melanggar perjanjian DK PBB dan Hukum Internasional.

*Kedua*, Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia secara politis dengan cara berdiplomasi dan aktif pada forum-forum Internasional, serta untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada Palestina, Indonesia membuat kebijakan pembebasan bea pajak produk Palestina yang masuk di Indonesia.









